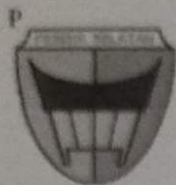


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600 / 46 /Perkimtan-PS/II/2020

Painan, 11 Februari 2020

Lampiran :

Perihal : *Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019*

Kepada,

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Pesisir Selatan

di

Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan No: 061/113.1/Org- Setda/2020 tanggal 23 Januari 2020 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019 ini disusun berpedoman Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor Tahun 53 Tahun 2014.

Painan, Februari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



NIP. 9640128-199309 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan pada tingkat Kabupaten sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

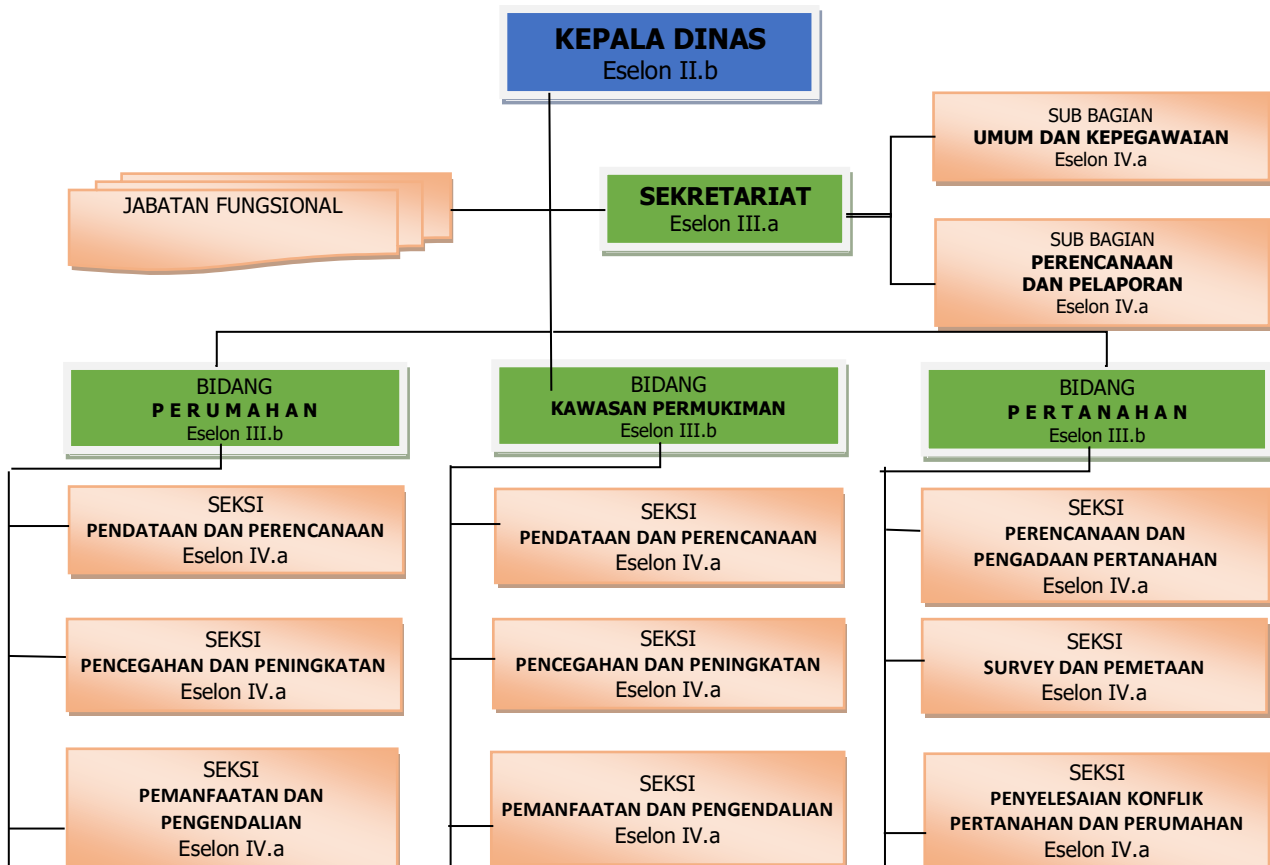
- a. Perumusan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan;
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- e. Bidang Pertanahan terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Pertanahan;
 2. Seksi Survey dan Pemetaan;

3. Seksi Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Perumahan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



2. KEPEGAWAIAN DAN TUPOKSI ESELON II DAN III

Untuk mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia dengan personil kepegawaian sebanyak 30 orang terdiri atas :

- Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang
- Golongan III sebanyak 20 (dua puluh) orang
- Golongan II sebanyak 7 (tujuh)
- Pegawai Non PNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang

Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagian besar adalah S1 (18 orang) diikuti oleh berpendidikan

SLTA/STM/SMEA (7 orang) dan Pasca Sarjana (5 orang). Sebaran PNS berdasar jenjang pendidikan diperlihatkan pada gambar 2.1

Gambar 2.1

**SUSUNAN PNS DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, TAHUN 2019**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	5 orang
2	Sarjana D4/S1	18 orang
3	Diploma 3	-
4	SLTA/STM/SMEA	7 orang
	JUMLAH	30 orang

Tugas dan fungsi dari masing – masing unit kerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Secara rinci, tugas pokok dan fungsi masing – masing unsur pejabat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan urusan Pengelolaan **Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan** yang akuntabel untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pada urusan penyelenggaraan dinas sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas yang meliputi sekretariat, bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang pertanahan, serta jabatan fungsional umum.
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dinas;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas pada dinas;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di lingkup dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pemberian dukungan pada penelitian dan pengembangan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta sumberdayanya;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pada urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas bidang dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi kegiatan bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. koordinasi pendataan, rencana, program, dan penganggaran dinas serta informasi publik;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi pelayanan umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, inventarisasi barang dan aset, pengarsipan dan dokumentasi dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERUMAHAN

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan perundangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;

- b. penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- c. pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan, peningkatan kualitas, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
- c. pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

BIDANG PERTANAHAN

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan perencanaan, pengadaan pertanahan, survey, pemetaan, penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pengadaan pertanahan;
- b. pelaksanaan survey dan pemetaan; dan
- c. penyelesaian konflik pertanahan dan perumahan

3. SARANA DAN PRASARANA

Perlengkapan organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini terdiri atas perlengkapan berupa Kantor, Mushalla, Kendaraan Operasional Dinas, serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya. Perlengkapan kantor terdiri atas 2 (dua) blok kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan luas lahan m2 dan bangunan seluas m2, terletak pada jalan Pahlawan Rawang Painan. Bangunan kantor tersebut terdiri dari 1 ruangan Kepala Dinas, 1 ruangan Sekretariat, 1 ruangan Bidang Perumahan, 1 ruangan Bidang Kawasan Permukiman, 1 ruangan Bidang Pertanahan, 1 ruangan pelayanan, 1 ruangan gudang, 1 musholla dan tempat wudhu. Disamping bangunan kantor

tersebut, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dilengkapi dengan peralatan kendaraan Dinas. Untuk lebih jelasnya perlengkapan yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperlihatkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 2.2
NAMA DAN JENIS SARANA DAN PRASARANA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
A	Peralatan dan Mesin	
1	Alat – alat Angkutan (Mobil Dinas)	3 unit
2	Kendaraan Roda Dua	6 unit
B	Gedung dan Bangunan	
1	Bangunan Gedung Kantor	2 unit
2	Bangunan Ruang Pelayanan	1 unit
3	Bangunan Gudang	1 unit
4	Bangunan Mushalla dan Tempat Wudhu	1 unit

4. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas Penataan permukiman kumuh, Ketersediaan rumah tidak layak huni, dan terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di kabupaten Pesisir Selatan yang berkeinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang sarana dan prasarana perumahan, permukiman dan pertanahan. Tingkat pelayanan kepada masyarakat diharapkan mengalami peningkatan yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang secara komprehensif akan melibatkan pihak-pihak terkait/ berkepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Pesisir Selatan antara lain sebagai berikut :

1. Isu strategis di Bidang Perumahan

- Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni
- Kondisi sarana dan prasarana utilitas (PSU) Perumahan baik yang dibangun oleh Developer maupun yang dibangun oleh pemerintah sendiri

2. Isu Strategis di Bidang Kawasan Permukiman

- Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh

3. Isu Strategis di Bidang Pertanahan

- Penyelesaian masalah konflik pertanahan
- Tersedianya pemetaan pemanfaatan tanah
- Tersertifikatkannya tanah pemerintah daerah Kab. Pesisir Selatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. MISI BUPATI YANG DIDUKUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk **Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan sejahtera** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparaturnya yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Dari ke lima misi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut di atas, maka **misi kedua** adalah misi yang harus diemban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi kedua tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah

2. TABEL MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan.

3. TABEL PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN/ ESELON II

A. TARGET PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
				2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,2134	0,2178	0,2211	0,2233	0,2255	Sumber data: Bidang Perumahan, Pesisir Selatan Dalam Angka Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
2.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Rasio Permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	96,74	96,76	96,79	96,82	96,85	Sumber data: Pesisir Selatan Dalam Angka, RTRW Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
3.	Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	Persentase luas lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Luas wilayah}}$	46%	49%	53%	57%	62%	Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab. Pesisir Selatan, Bagian Aset DPKD, BPN Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

B. TARGET PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELAN/FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNGJAWAB
				2019	2019	
1	2	3	4	5	6	10
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rasio Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	0,2211	0,245	Sumber data: Bidang Perumahan, Pesisir Selatan Dalam Angka Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
2.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Rasio Permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}}$	96,79	96,809	Sumber data: Pesisir Selatan Dalam Angka, RTRW Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan
3.	Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	Persentase luas lahan yang bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan yang bersertifikat} \times 100\%}{\text{Luas wilayah}}$	53%	64,341%	Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kab. Pesisir Selatan, Bagian Aset DPKD, BPN Penanggungjawab: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Pesisir Selatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Perumuan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro serta indikator kinerja strategis.

1. Tabel Capaian Kinerja

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	0,2211	0,245	110,80 %	Pengembangan Perumahan	Rp. 12.831.352.528	Rp. 12.293.592.833	95,81%
						Lingkungan sehat perumahan	Rp. 4.225.597.361	Rp. 4.065.697.714	96,22%
						Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp. 2.381.231.513	Rp. 2.352.225.800	98,78%
2.	Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan	Rasio permukiman layak huni	96,79	96,809	100,02%	Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Rp. 6.753.222.890	Rp. 6.667.595.900	98,73%
						Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 1.050.068.702	Rp. 1.029.328.000	98,02%
						Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Rp. 4.659.480.070	Rp. 4.585.213.387	98,41%
3.	Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan	Persentase luas lahan yang bersertifikat	53%	64,341%	121,34%	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp. 18.855.252.916	Rp. 3.082.139.735	16,35%
						Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp. 99.470.000	Rp. 86.753.550	87,22%

BAB IV

PENUTUP

1. REKAPITULASI BEBERAPA SASARAN YANG MENCAPAI TARGET DAN YANG TIDAK MENCAPAI TARGET

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019, yaitu:

a. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, yang nilai tertinggi 121,34% yaitu sasaran “Terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan”. Sedangkan nilai terendah 100,02% yaitu sasaran “Meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan”.

b. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, ketiga indikator kinerja berhasil mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja adalah 109,82%, dengan nilai tertinggi adalah 121,34% yaitu indikator kinerja utama “Persentase luas lahan yang bersertifikat”, sedangkan nilai terendah 100,02% yaitu indikator kinerja utama “Rasio permukiman layak huni”.

2. REKAPITULASI BEBERAPA ANGGARAN YANG DIBUTUHKAN DAN REALISASI UNTUK MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai target sasaran meningkatnya ketersediaan rumah layak huni anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 19.438.181.402, - dan terealisasi Rp. 18.711.516.347,- (96,26%), sasaran meningkatnya kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 12.462.771.662,- dan terealisasi Rp. 12.282.137.287,- (98,55%), dan sasaran terwujudnya kepastian hukum pemilikan tanah di Kab. Pesisir Selatan anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 18.954.722.916,- dan terealisasi Rp. 3.168.893.285,- (16,72%)

3. SARAN DAN TINDAK LANJUT YANG AKAN DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI TAHUN YANG AKAN DATANG

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

2. Mengharapkan dukungan dari berbagai pihak (terutama Tim TAPD) untuk memberikan anggaran untuk mengatasi kawasan kumuh di Pesisir Selatan yang di dalam target RPJMD pada Tahun 2021 kab. Pesisir Selatan sudah bebas dari kawasan kumuh;
3. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
5. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar supaya pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;

DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



BEFORE



AFTER

DOKUMENTASI REHA

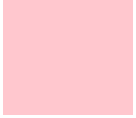


BEFORE

BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI



AFTER



DOKUMENTASI REHA

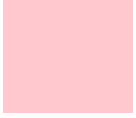


BEFORE

BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI



AFTER



DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



BEFORE



AFTER

DOKUMENTASI REHA

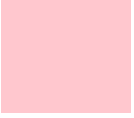


BEFORE

BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI



AFTER



DOKUMENTASI REHA

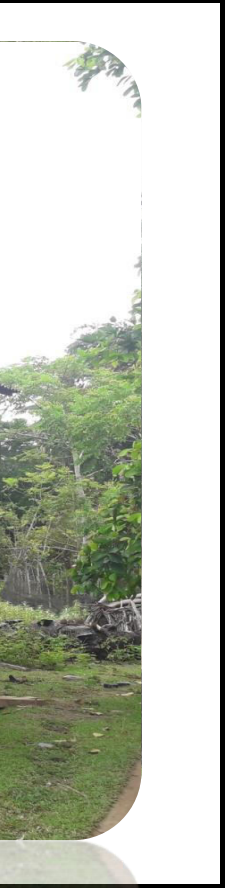
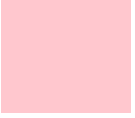


BEFORE

BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI



AFTER



DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



BEFORE



AFTER

DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



BEFORE



AFTER

DOKUMENTASI REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI



BEFORE



AFTER



AFTER

BEFORE

DOKUMENTASI REHA

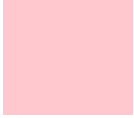


BEFORE

BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI



AFTER



AFTER

BEFORE

BEFORE

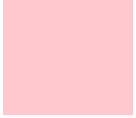


BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI

AFTER



AFTER

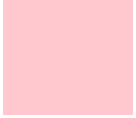


BEFORE



BILITASI RUMAHTIDAK LAYAK HUNI





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BUPATI PESIR SELATAN
TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019	PERUBAHAN TARGET 2019	REALISASI 2019	KETERANGAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Sosial secara Berkelanjutan dan Menurunkan Ketimpangan								
		d. Rasio Rumah Layak Huni		0,2211		0,245		1. Data Penerimaan Dalam APBN 2. Data Penerimaan Dalam APBD 3. Data Penerimaan Dalam BAZ 4. Data Penerimaan Dalam APBD 5. Data Penerimaan Dalam APBD	

A. Rasio Rumah Layak Huni

- Formulasi Indikator Rumah Layak huni
Jumlah Rumah Layak Huni/Jumlah Penduduk
- Data times series Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni
Jumlah bantuan Rumah dari APBD, NAGARI, APBN, BAZ
- Permasalahan dan kendala

Terjadi perubahan signifikan penanganan Rumah Tidak Layak Huni dari tahun 2017 ke 2018. Tahun 2017 penanganan rumah tidak layak huni hanya 78 unit terdiri dari dana APBD 28 unit dan APBN (DAK) 50 Unit. Hal ini disebabkan karena Dinas PERKIMTAN yang baru berdiri tahun 2017. untuk penanganan RTLH 2018 DAN 2019 diupayakan untuk menuntaskan rumah tidak layak huni dengan program APBN Secara Intens ke KEMENPUPR Cq. DIRJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN. Serta didukung oleh dana dari BAZ, dan komitmen pemerintah nagari untuk menyediakan dana dari APBD Nagari minimal 2 unit pertahun.

4. Faktor Keberhasilan

5. Program pendukung, anggaran, realisasi dan capaian tahun 2019

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN TAHUN
a	Pengembangan Perumahan	Rp. 12.831.352.528	Rp. 12.293.592.833	95,81%
b	Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 4.225.597.361	Rp. 4.065.697.714	96,22%
c	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp. 2.381.231.513	Rp. 2.352.225.800	98,78%

6. Dokumentasi



**DAFTAR JUMLAH RUMAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2019**

NO	LOKASI	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2019	JUMLAH RLH	KET.
1	2	3	4	5	6
1	KOTO XI TARUSAN	14,638	0	14,638	
2	BAYANG	1,447	0	1,447	
3	BAYANG UTARA	9,632	28	9,604	
4	IV JURAI	6,787	0	6,787	
5	BATANG KAPAS	11,692	42	11,650	
6	SUTERA	13,351	396	12,955	
7	LENGAYANG	16,166	97	16,069	
8	RANAH PESISIR	10,297	536	9,761	
9	LINGGO SARI BAGANTI	7,801	630	7,171	
10	AIR PURA	3,221	137	3,084	
11	PANCUNG SOAL	5,200	269	4,931	
12	BASA IV BALAI TAPAN	2,455	22	2,433	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	3,147	310	2,837	
14	LUNANG	5,038	0	5,038	
15	SILAUT	3,366	0	3,366	
	JUMLAH	114,238	2,467	111,771	

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan

MUMHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

